

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dan merupakan hak asasi manusia yang tertuang didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia ialah kesehatan. Setiap kegiatan yang dilakukan guna memelihara serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara maksimal yang dilakukan berlandaskan prinsip nondiskriminasi, keikutsertaan dan berkelanjutan dalam upaya penciptaan peningkatan ketahanan sumber daya manusia dan daya saing bangsa bagi pembangunan negara.<sup>1</sup>

Indikator derajat kesehatan ialah sarana ataupun fasilitas kesehatan menjadi alat atau tempat penyelenggaraan layanan kesehatan yang dilaksanakan pemerintah daerah serta masyarakat secara promotif, preventif, maupun kuratif dan rehabilitatif.<sup>2</sup> Penyelenggaraan usaha kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative merupakan fungsi dari fasilitas pelayanan kesehatan.<sup>3</sup>

Puskesmas menekankan usaha promotif dan preventif dalam penyelenggaraan usaha kesehatan perorangan maupun masyarakat guna pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang tinggi di dalam wilayahnya.<sup>4</sup> Puskesmas dan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) memiliki keterkaitan yang erat yakni semakin banyak peserta JKN yang menggunakan pelayanan kesehatan berarti pelayanan yang diberikan puskesmas kepada peserta JKN baik, tetapi dapat pula terjadi hal yang sebaliknya.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari Data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018 Puskesmas di Indonesia sampai dengan Desember 2018 ialah berjumlah 9.993 puskesmas, terdiri dari 3.623 Puskesmas rawat inap dan 6.370 Puskesmas non rawat inap. Jumlah puskesmas ini terus naik dibanding tahun 2017 yakni sebanyak 9.825, Puskesmas rawat inap berjumlah 3.454 puskesmas dan Puskesmas non rawat inap

berjumlah 6.371 puskesmas, sedangkan jumlah puskesmas di Kota Jambi sebanyak 20 puskesmas.<sup>6</sup>

Pelayanan kesehatan yang baik adalah keberhasilan pembangunan dan indikator keberhasilan pembangunan ialah kebutuhan masyarakat. Pemerintah selalu berupaya membuat program-program yang dapat membuat peningkatan pelayanan kesehatan yang menyeluruh karena kebutuhan setiap warga negara akan pelayanan kesehatan, dan salah satu programnya ialah penyelenggaraan JKN yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berlandaskan Undang Undang No 40 tahun 2004 perihal Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).<sup>5</sup>

Amanah UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002 adalah mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dari itu terbentuklah JKN. Tujuan dibentuknya JKN ialah agar terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi peserta jaminan beserta keluarganya. Prinsip-prinsip pembentukan sistem jaminan sosial ini berdasarkan prinsip gotong royong, nirlaba atau non profit, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, bersifat wajib, amanat, dan hasil dananya dikelola untuk kepentingan peserta guna pengembangan program yang dimanfaatkan sebesar-besarnya.<sup>7</sup>

Badan Pusat Statistik 2020 menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 261.890.900 jiwa.<sup>8</sup> Jumlah penduduk di Indonesia yang telah terdaftar di Program Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 222.435.719 jiwa (82%) per 31 Agustus 2020. Peserta BPJS Kesehatan terbesar berasal dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI APBN) yakni mencapai 96.696.683 jiwa, sedangkan peserta dari Penerima Bantuan Iuran APBD sebanyak 35.118.769 jiwa, Pekerja Penerima Upah PN (PBU-PN) sebanyak 17.716.869 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU-BU) 37.364.257 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 30.487.891 jiwa, dan peserta Bukan Pekerja (BP) berjumlah 5.051.250 jiwa.<sup>9</sup>

Program JKN sudah berjalan dan diterapkan terhitung mulai 1 Januari 2014 yang saat ini dimana provinsi Jambi tahun 2019 masyarakat yang telah

memiliki jaminan kesehatan sebanyak 1.685.482 peserta. Peserta BPJS kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 786.533 jiwa (21,70%) dan peserta BPJS kesehatan Non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu sebanyak 898.895 jiwa (24,80%). Di kota Jambi peserta BPJS kesehatan PBI sebanyak 132.463 jiwa (21,91%) dan peserta BPJS kesehatan Non PBI yaitu sebanyak 278.469 jiwa (46,06%) dan kota Jambi merupakan yang tertinggi cakupan kepesertaannya di provinsi Jambi.<sup>8</sup>

Hasil penelitian Nguyen, dkk di Vietnam didapatkan bahwa seseorang yang memiliki asuransi namun tidak menggunakannya amat berbeda perilaku dengan yang menggunakan asuransi. Hasil penelitian Wang, dkk di China juga mengemukakan bahwa tingkat pengetahuan dan pendapatan juga mengemukakan bahwa terdapat hubungan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap pemanfaatan asuransi.<sup>10</sup> Hasil penelitian Negash (2019) di Ethiopia Barat mengemukakan bahwa terdapat pengaruh umur, jenis kelamin, serta pendidikan kepala rumah tangga terhadap penggunaan asuransi pada pekerja informal.<sup>11</sup>

Hasil penelitian Septianingrum dan Sari (2015) mengemukakan bahwa tindakan peserta JKN dalam penggunaan pelayanan kesehatan dipegaruhi oleh pengetahuan responden mengenai JKN. Penyebab ibu hamil tidak menggunakan kartu BPJS Kesehatan disaat menggunakan pelayanan kesehatan dikarenakan rendahnya pengetahuan ibu hamil mengenai JKN.<sup>12</sup>

Penelitian Wulandari, dkk (2016), mengemukakan penampilan fisik fasilitas kesehatan adalah faktor yang mempengaruhi penggunaan layanan kesehatan dikarena berpengaruh pada waktu tunggu dalam memperoleh layanan kesehatan yang diinginkan. Hal terpenting dalam menarik minat pasien menggunakan pelayanan kesehatan ialah kenyamanan, kerapian, kebersihan, kelengkapan obat dan alat periksa di fasilitas kesehatan.<sup>13</sup> Hasil uji statistik diperoleh hubungan yang signifikan antara pendapatan terhadap penggunaan JKN. Setiap bulannya, peserta JKN diharuskan membayar iuran bulanan, seseorang akan sanggup menggunakan JKN apabila ia mempunyai penghasilan yang cukup. Sejalan dengan penelitian Parangka, dkk tahun 2017, di puskesmas Wawonasa

kecamatan Singkil kota Manado terdapat hubungan pendapatan peserta BPJS dalam penggunaan pelayanan kesehatan.<sup>14</sup>

Tujuan utama program JKN ialah peningkatan kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan sesuai kebutuhan. Apabila pemanfaatan JKN semakin banyak dan semakin baik dirasakan oleh seluruh masyarakat maka itu merupakan gambaran ideal tercapainya program JKN.<sup>10</sup> Tetapi, besarnya kepesertaan JKN di Kota Jambi tidak sebanding dengan penggunaannya, Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2019 jumlah kunjungan puskesmas kota Jambi sebanyak 658.240 pasien, 250.651(38,07%) diantaranya tidak menggunakan asuransi kesehatan dalam menggunakan pelayanan kesehatan dikarenakan tidak mempunyai asuransi kesehatan.<sup>15</sup>

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jambi menyatakan bahwa sebanyak 180.353 atau 83,75% dari 215.327 peserta BPJS Kesehatan PBPU atau pekerja informal berstatus non aktif.<sup>16</sup> Survei pendahuluan yang dilakukan peneliti pada 21 pekerja informal peserta JKN mandiri yakni pedagang, tukang ojek dan pemilik toko kelontong, 5 tukang ojek peserta JKN mandiri berstatus non aktif, 6 pedagang peserta JKN mandiri berstatus non aktif, 6 pemilik toko kelontong peserta JKN berstatus non aktif dan 4 pemilik toko kelontong pemilik JKN mandiri berstatus aktif dan menggunakan JKN setiap berobat. Pemilik JKN yang berstatus non aktif menyatakan bahwa mereka merasa rugi membayar iuran BPJS setiap bulannya karena jarang sakit bahkan tidak pernah sakit, dan ada juga yang menyatakan bahwa pendapatan yang tidak pasti membuat mereka keberatan dalam membayar iuran BPJS setiap bulannya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya *universal health coverage* tidak selalu meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, ada faktor lain yang juga mempengaruhi minat masyarakat khususnya pekerja informal dalam pemanfaatan jaminan kesehatan. Keadaan ini dapat menghambat upaya pemerintah untuk mencapai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang baik untuk masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti tentang “Minat Pemilik Jaminan

Kesehatan Nasional Sektor Informal dalam Penggunaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Jambi Tahun 2020”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini ialah Minat Pemilik Jaminan Kesehatan Nasional Sektor Informal dalam Penggunaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Jambi Tahun 2020.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Mengidentifikasi Minat Pemilik Jaminan Kesehatan Nasional Sektor Informal dalam Penggunaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Jambi Tahun 2020

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi hubungan faktor umur dengan minat pemilik jaminan kesehatan nasional sektor informal dalam penggunaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Jambi
2. Mengidentifikasi hubungan faktor jenis kelamin dengan minat pemilik jaminan kesehatan nasional sektor informal dalam penggunaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Jambi
3. Mengidentifikasi hubungan faktor tingkat pendidikan dengan minat pemilik jaminan kesehatan nasional sektor informal dalam penggunaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Jambi
4. Mengidentifikasi hubungan faktor pendapatan dengan minat pemilik jaminan kesehatan nasional sektor informal dalam penggunaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Jambi
5. Mengidentifikasi hubungan faktor pengetahuan dengan minat pemilik jaminan kesehatan nasional sektor informal dalam penggunaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Jambi

6. Mengidentifikasi hubungan faktor fasilitas kesehatan dengan minat pemilik jaminan kesehatan nasional sektor informal dalam penggunaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Jambi
7. Mengidentifikasi hubungan faktor kebutuhan dengan minat pemilik jaminan kesehatan nasional sektor informal dalam penggunaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Jambi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. BPJS Kesehatan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap BPJS dijadikan sebagai referensi dalam mengevaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

### **1.4.2 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelatihan meningkatkan pelayanan khususnya dalam penyuluhan tentang keuntungan program layanan JKN sehingga masyarakat lebih memahami manfaat dari program JKN.

### **1.4.3 Institusi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dijadikan sebagai literatur mengenai kepesertaan dan minat Jaminan Kesehatan Nasional serta dapat dijadikan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya.

### **1.4.4 Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan memotivasi minat dalam penggunaan JKN khususnya pekerja informal.

### **1.4.5 Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian lainnya.

